

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara

Dona Ridwan^{1*}, Ali Anis²

^{1,2}Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: <mailto:donaridwan@gmail.com>

Info Artikel

Diterima:

20 Januari 2022

Disetujui:

28 Februari 2022

Terbit daring:

01 Maret 2022

Sitasi:

Ridwan, D, & Anis, A, (2022).
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(1),

Abstract

This study aims to find and analyze the effect of (1) Original Local Government Revenue, (2) General Allocation Fund, (3) Special Allocation Fund and (4) Revenue Sharing Fund on Economic Growth in North Sumatra Province by using a panel regression equation model. and using the Random Effect Model (REM) approach. The estimation results show that: (1) Original Local Government Revenue has a negative but insignificant effect on economic growth in north Sumatera Province, (2) General Allocation Fund have a positive and significant effect on economic growth in North Sumatera, (3) Special Allocation Fund have a positive effect but not significant to economic growth in North Sumatera Province, (4) Revenue Sharing Fund have a positive but insignificant effect on economic growth in North Sumatera Province, (5) Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund together have a significant effect on economic growth in North Sumatra Province. Based on the results of this study, local governments are expected to further optimize the use of Local Own Revenue and Balancing Funds, because they can have an influence on economic growth in North Sumatra Province.

Keywords:

Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation fund, Revenue Sharing fund.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus dan (4) Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan model persamaan regresi panel dan menggunakan pendekatan *Random Effect Model (REM)*. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, (4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, (5) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Secara Bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan lebih mengoptimalkan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, karena dengan begitu dapat memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci :

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK), Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil

Kode Klasifikasi JEL: H7, H71, E62

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sudah memberlakukan sistem otonomi daerah. Dengan sistem tersebut mengakibatkan pemerintah daerah dilimpahkan kewenangan agar dapat mengatur segala urusan dalam daerahnya sendiri dan

meminimalisir adanya campur tangan pemerintah pusat, adanya rangsangan ini akan memacu setiap daerah untuk saling berlomba dalam meningkatkan potensi daerahnya hingga sanggup mewujudkan peningkatan ekonomi. Sebab dari itu maka sangat terlihat bahwa otonomi daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembangunan daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu kondisi perubahan ekonomi suatu wilayah atau negara secara berkelanjutan kearah kondisi yang lebih baik dalam priode tertentu. Peningkatan ekonomi bisa juga dijelaskan dengan proses pertumbuhan kapasitas produksi perekonomian yang dinyatakan kedalam bentuk pertumbuhan pendapatan nasional. Terdapatnya peningkatan ekonomi ialah dampak dari kesuksesan pembangunan prekonomian. Menurut Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000) pertumbuhan ekonomi ialah suatu peningkatan dalam jangka panjang dengan kemampuan negara tersebut untuk terus sanggup dalam mencadangkan barang - barang ekonomi untuk penduduknya. Kemampuan tersebut berkembang selaras dengan adaptasi kelembagaan, perkembangan dalam bidang teknologi, dan ideologi yang dibutuhkan.

Didalam era desentralisasi fiskal ini, kita berharap terjadinya penambahan pelayanan pemerintah pada sektor publik terutamanya. Dengan peningkatan pelayanan publik tersebut diharapkan mampu mendorong para investor untuk tertarik membangun usaha di berbagai daerah. Usaha ini akan bisa terwujud jika adanya upaya pemerintah dalam penyediaan bermacam sarana untuk investasi. Akibatnya adalah pemerintah harus memenuhi berupa alokasi belanja dalam jumlah yang cukup besar dalam target tersebut.

Desentralisasi pada satu sisi memberikan otoritas yang besar untuk mengelola suatu daerah, namun pada sisi lainnya menimbulkan persoalan yang baru, disebabkan setiap daerah memiliki kesiapan fiskal yang berbeda-beda. Perubahan alokasi belanja diarahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Menurut Saraswati, D. (2018) untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka dana transfer dari pemerintah pusat semestinya bisa dimanfaatkan oleh pejabat dalam daerah dengan efektif serta juga efisien. faktanya pendapatan daerah yang meningkat tidak konsisten diikuti oleh meningkatnya pertumbuhan daerah tersebut.

Pemerintah Pusat mengeluarkan dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana lokasi khusus dan juga dana bagi hasil dengan tujuan mengatasi kesenjangan infrastruktur yang terjadi di setiap daerah maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi disetiap daerah secara merata. DAU, DAK dan DBH merupakan suatu dana yang sumbernya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dibagikan terhadap setiap daerah yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan setiap daerah dalam membiayai kebutuhan daerah untuk perwujudan desentralisasi.

Dana alokasi umum yang bersumber dari APBN merupakan salah satu dana transfer pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, kemudian disalurkan dengan maksud pemerataan keuangan disetiap daerah dalam membiayai kepentingan daerah didalam perwujudan desentralisasi tersebut. Dana alokasi Khusus memiliki sifat block grant yang artinya dalam fungsinya dilimpahkan terhadap daerah berdasarkan prioritas dan keperluan daerahnya dalam memajukan pelayanan terhadap masyarakat, didalam rangka pelaksanaan kegiatan otonomi daerah.

Dana alokasi khusus (DAK) ialah dana dengan sumber pendapatannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kemudian didistribusikan terhadap daerah - daerah tertentu, bermaksud untuk membantu membiayai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional yang merupakan urusan daerah (Undang-Undang No. 33 tahun 2004).

DBH atau lebih dikenal dengan dana bagian daerah adalah sumber pendapatan bagi daerah yang berfokus terhadap kemampuan daerah itu sendiri (Djaenuri, 2012 : 100). Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas: (1) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan, (2) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (3) Bagian Daerah dari Bea untuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Otonomi Daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan secara penuh otoritas kepada setiap daerah provinsi, kabupaten/kota demi mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri serta kepentingan pemerintah berdasarkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Wewenangan yang diberikan terhadap pemerintah daerah agar dapat mewujudkan potensi sumber keuangan yang ada pada daerah tersebut atas dasar diberlakukannya otonomi daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota. Akan terjadi peningkatan pendapatan daerah apabila semakin banyak sumber keuangan yang digali di daerah tersebut, kemudian akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi didalam suatu daerah (Dwirandra, 2013).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2018

Tahun	PDRB	PAD (Rp.000)	DAU (Rp.000)	DAK (Rp.000)	DBH (Rp.000)
2017	491.924.130.000	5.420.209.349	21.434.274.638	6.269.699.927	1.248.120.040
2018	518.300.960.000	5.160.752.589	21.442.356.759	6.407.893.532	1.318.670.740
Laju (%)	5,36	-4,79	0,04	2,20	5,65

Dari Tabel 1 dapat tarik penjelasan bahwa nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 5,36 persen, sementara nilai PAD mengalami penurunan sebesar -4,79 persen, hal ini mungkin disebabkan karena seringnya terjadi longsor di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sehingga pendapatan daerah khususnya kabupaten/kota yang terkena langsung mengalami penurunan. Dana alokasi umum, Dana Alokasi Khusus kemudian Dana Bagi Hasil masing-masing terjadi peningkatan dari tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,04 persen untuk peningkatan DAU, 2,20 persen untuk peningkatan DAK dan 5,65 persen untuk peningkatan DBH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif dengan data yang dimasukkan bersifat kuantitatif berbentuk angka-angka yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, PAD dan dana perimbangan. Penelitian ini dilakukan di pulau Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Jenis data yang digunakan berbentuk data panel dan data yang diperoleh yaitu data skunder pada tahun 2017-2018, data yang diperlukan diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dimana kumpulan data dari laporan realisasi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Variabel bebas adalah yang dapat mempengaruhi atau variabel yang bisa menjadi sebab perubahan atau *variabel independet*. Variabel bebas didalam penelitian ini yaitu PAD(X1) dan Dana Perimbangan(X2). Variabel terikat adalah yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas atau disebut juga dengan *variabel dependent*. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Defenisi operasional adalah defenisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, serta menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel tersebut. Pertumbuhan Ekonomi yaitu pertumbuhan dari nilai riil perekonomian di Provinsi Sumatera Utara yang diukur dari PDRB ADHK dalam bentuk rupiah yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota. Pendapatan Asli Daerah yaitu perolehan setiap daerah yang diterima dari sumber-sumber wilayahnya di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diukur dengan satuan rupiah tahun 2017-2018. Dana Perimbangan yaitu dana yang

sumbernya dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah serta mengurangi ketimpangan antar daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK dan DBH yang dilihat dari tahun 2017-2018 dengan satuan rupiah.

Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi panel, beberapa metode yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu : *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)*, dan *random effect model (REM)*. Didalam analisis induktif ada beberapa uji yaitu : *uji chow*, *uji hausman* serta *uji langrange multiplier*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam temuan ini dibahas seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan analisis regresi panel dan menggunakan metode Random Effect Model. Dimana Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependent. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel independent.

Model yang ditunjukkan didalam analisis penelitian ini adalah:

$$\log \widehat{Y}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 \log X_{2it} + \beta_3 \log X_{3it} + \beta_4 \log X_{4it} + U_{it} \quad (1)$$

Tabel 2. Hasil Estimasi Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-39.96338	5.963007	-6.701884	0.0000
LOG (X1)	-0.022906	0.031041	-0.737938	0.4634
LOG (X2)	2.554516	0.227555	11.22592	0.0000
LOG (X3)	0.034968	0.059299	0.589695	0.5576
LOG (X4)	0.001698	0.011300	0.150233	0.8811
<i>Effects Specification</i>				
			S.D.	Rho
Cross-Section Random			0.475877	0.9940
Idiosyncratic Random			0.036823	0.0060
<i>Weighted Statistics</i>				
R-Squared	0.683173	Mean Dependent Var	1.621767	
Adjusted R-Squared	0.662397	S.D. Dependent Var	0.064974	
S.E. of Regression	0.037752	Sum Squared Resid	0.086939	
F-Statistic	32.88348	Durbin-Watson Stat	1.841368	
Prob (F-Statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan Eviews8, 2021

Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan dimana pengaruh pendapatan daerah dan perimbangan daerah dari tahun 2017-2018 melalui estimasi maka diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan koefisien sebesar -39,963. Hal ini berarti jika variabel Pendapatan Daerah (PAD) serta Dana Perimbangan adalah 1% maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara juga ikut serta menurun sebesar 39,963% di dalam aturan *ceteris paribus*. Nilai R-squared bernilai

0,683% menjelaskan bahwa variabel bebas didalam model sanggup menunjukkan variabel terikat sebanyak 68% dan 32% dijelaskan dari variabel lainnya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) bernilai negatif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dalam jumlah koefisien regresi bernilai -0.023 dengan nilai probabilitas signifikan 0.463 . Hasil ini memperlihatkan bahwasanya jumlah probabilitas signifikan tinggi dari nilai probabilitas 0.05 , maka bisa disebutkan bahwa variabel PAD tidak memiliki pengaruh signifikan negatif kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara akan menurun sebesar 0.023 .

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAK) (X_2) bernilai positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien regresi sebesar 2.554 dan nilai probabilitas signifikan 0.0000 . Maka nilai itu bisa dikatakan bahwasanya nilai signifikansi probabilitas lebih rendah dari nilai probabilitas 0.05 . Hal ini berarti apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat 1% akan menghasilkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar 2.554 , dengan arti lain semakin meningkat DAU maka akan meningkatkan perkembangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam asumsi ceteris paribus.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_3) bernilai positif namun tidak signifikan didalam pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien regresi bernilai 0.035 dan besaran probabilitas signifikan 0.558 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah probabilitas yang signifikan terlihat memiliki jumlah lebih besar dari jumlah probabilitas 0.05 , maka dari itu dapat diambil kesimpulan variabel DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif kepada Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh variabel Dana Bagi Hasil (X_4) bernilai positif namun tidak signifikan kepada perkembangan ekonomi (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien regresi sebesar 0.002 dan nilai probabilitas signifikan 0.881 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang signifikan memiliki nilai yang lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 , maka dari itu dapat diambil kesimpulan variabel DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Dari penilaian, dijelaskan bahwa PAD tidak mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara berdampak negatif terhadap pertumbuhan moneter. Hasil ini bertentangan dengan spekulasi dan hipotesis yang dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, dimana peningkatan PAD dianggap ikut membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah merupakan keseluruhan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri, dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang terdapat di daerah tersebut oleh pemerintah daerah, dari sumber cenderung terlihat bahwa dalam pendapatan pajak retribusi daerah sangat mempengaruhi pendapatan di dalam kabupaten yang digambarkan oleh PDRB, yang diperoleh pada berbagai bidang pendapatan di Provinsi Sumatera Utara memang tidak berjalan dengan baik. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak efektif menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang menyenangkan antara sebagian dari staf baru dan persiapan pemerintah lingkungan untuk membantu mutu layanan publik. Tidak hanya itu pemberian beban terhadap biaya barang ataupun jasa yang ditawarkan yang ditanggung langsung oleh perusahaan/organisasi Propinsi benar-benar mengurangi output yang dihasilkan, dengan minimnya PDRB yang diperoleh suatu daerah tentunya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian di daerah

tersebut. Jadi poin yang sangat penting bagi pemerintah daerah adalah untuk memperkuat sektor pendapatannya untuk menghasilkan output yang maksimal di setiap sektornya.

Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian Prakarsa, F. (2014) dalam jurnal ilmiahnya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota Se Jawa Timur, yang kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang negatif antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Sangat jelas terlihat dari realisasi penerimaan APBD di Provinsi Sumatera Utara masih besarnya dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Sumatera Utara jika dibandingkan dengan yang di terima pendapatan asli daerah. Persoalan ini menjelaskan bahwa daerah memiliki ketergantungan yang masih begitu tinggi terhadap pusat dikarenakan pendapatan daerah yang belum maksimal, juga dapat dilihat dari potensi PAD hanya berfokus pada pendapatan yang bersumber dari pajak, dimana komponen pajak menyumbang 92,56 persen dalam perolehan PAD Sumatera Utara.

Berdasarkan analisis data menghasilkan pengaruh yang signifikan antara DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dana alokasi umum adalah salah satu pengiriman dana antara program pengeluaran tertentu dengan tingkat pemerintahan yang tidak terikat. Tujuan dari dana alokasi umum ini sebagai pengganti pengiriman berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari pembangian ini adalah untuk menutup perbedaan fiskal serta untuk menyamakan kemampuan fiskal setiap daerah, sehingga dana alokasi umum setiap daerah tidak akan serupa nilainya.

Hasil yang sama dengan penelitian Oktafia, A. M., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2018), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016, yang menyatakan bahwa setiap Dana Alokasi Umum yang diterima langsung setiap pemerintah daerah, akan dialokasikan sebagai dana pembiayaan pemerintah daerah, salah satunya merupakan belanja modal dengan tujuan dalam peningkatan PDRB. Maka dalam hal ini jika DAU yang diterima setiap pemerintah daerah semakin meningkat maka akan berdampak terhadap PDRB, dengan kata lain ekonomi di daerah tersebut akan meningkat pula.

Hasil penelitian Permanasari, W. A. (2013), menghasilkan pengaruh yang signifikan antara DAU dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan DAU yang diperoleh pemerintah maka akan menimbulkan nilai tambah pada PDRB pemerintah suatu daerah. Hal ini terjadi karena fungsi DAU begitu tinggi, dengan alasan belanja daerah lebih di kuasai dari jumlah absolut DAU, maka setiap penerimaan DAU oleh pemerintah daerah akan dijadikan untuk keperluan belanja pemerintah daerah, termasuk belanja modal.

Pada penelitian terdahulu menyimpulkan jika dana alokasi umum memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, Siswiyanti (2015). Suatu hibah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan untuk memperoleh tujuan, sehingganya dana alokasi umum dapat dipergunakan sebagai pembangunan infrastuktur serta sarana prasarana di dalam daerah. Dan tentunya sangat diharapkan dari pembangunan tersebut memiliki dampak terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi di dalam daerah supaya tidak terjadi ketimpangan fiskal pada suatu daerah.

Dari hasil analisis ditemukan bahwa DAK berpengaruh positif akan tetapi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Larang, et,al,(2017); Akbar, Taufik. (2012) dimana penelitian menunjukkan bahwasanya DAK tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dalam perihal ini bisa jadi disebabkan karena dana alokasi khusus yang diperoleh oleh pemerintah setiap daerah tidak dipergunakan sepenuhnya dalam unsur kegiatan yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus didalam

daerah. Dana alokasi khusus dalam hal ini sudah digunakan untuk belanja infrastruktur pendidikan, kesehatan serta sebagainya yang memungkinkan bisa menjadi bukan prioritas didalam daerah tersebut, dana alokasi khusus tidak dapat menunjang pertumbuhan ekonomi seperti layaknya infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan karena tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu dengan kewajiban mengadakan pendamping dana dengan jumlah 10% dari jumlah keseluruhan alokasi DAK pada APBD pastinya dapat menggeser beberapa anggaran belanja yang ada yang mungkin seharusnya diperuntukkan dalam pembangunan berbagai infrastruktur sarana prasarana sehingga pada akhirnya tidak bisa membantu dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di dalam daerah.

Dari hasil analisis ditemukan bahwa DBH juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Terdapat beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam yang luas dan ada beberapa daerah yang justru tidak mempunyai sumber daya alam yang besar namun struktur perekonomiannya sudah tersusun dengan rapi maka sumber pajak dapat dimaksimalkan. Nilai DBH yang diterima pemerintah daerah sesuai dengan nilai persentase. Hal tersebut merupakan dampak dari potensi yang terdapat di setiap Kabupaten/Kota yang berbeda-beda, bersumber dari DBH adalah sumber daya alam dan pajak, pembagian dari hasil sumber daya dan pajak akan kecil jika sumber daya alam dan pajak suatu daerah kecil. Oleh karenanya, DBH tidak berbanding lurus atau memiliki pengaruh dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini juga DBH yang bersumber dari sumber daya alam dan pajak menunjukkan bahwa pendapatan sumber daya alam dan pajak di Provinsi Sumatera Utara masih lemah sehingga kurang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Utara masih kurang tertata sehingga kurang dalam hal menggali potensi pajak daerah. Dana Bagi hasil semestinya melakukan kajian yang insentif terhadap instrumen transfer, dikarenakan bahwa DBH berpegang kepada indikator indikator kemakmuran bersama, sebagian besar daerah yang memiliki sumber daya alam kurang menikmati kemakmuran, maka dari itu dengan adanya DBH setiap daerah ikut serta merasakan hasilnya daerahnya. Penelitian ini mendukung temuan terdahulu dari Rahmah AR dan Drs. Basri Zein dalam judul penelitiannya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAK serta DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada wilayah Provinsi Aceh.

SIMPULAN

Didalam hasil analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh PAD, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara selama 2 tahun dalam periode penelitian, disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Maka dapat menjelaskan apabila pendapatan asli daerah melalui peningkatan maka tidak ikut serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjelaskan apabila penerimaan DAU meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat. DAK dan DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjelaskan apabila penerimaan DAK dan juga DBH meningkat maka tidak akan berdampak kuat pada perkembangan ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Taufik. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal*. Skripsi. Bandung, Universitas Pasundan.
- Amagoh, F., & Amin, A. A. (2012). *An examination of the impacts of fiscal decentralization on economic growth*. International Journal of Business Administration, 3(6), 72.
- BPS Provinsi Sumatera Utara 2015-2018*

- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). *Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika, 12(2), 67-76
- Dewi, N. W.R & Suputro (2017) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. E-Jurnal Akuntansi, 18(3), 1745-1773.
- Djaenuri, H. A., & Enceng, M. S. (2012). *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. *Jhingan, ML. 2000*. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maryati, Ulfi serta Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansidan Manajemen, vol 5, No. 2, Desember 2010.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh)*. Jurnal Akuntansi ISSN, 2302, 0164.
- Oktafia, A. M., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 2(1), 53-62.
- Permanasari, W. A. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Prakarsa, F. (2014). *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur tahun 2008-2012)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Putri, Z. E. (2015). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Uumum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah*. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 5(2).
- Sraswati, D. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 54-68.
- Siswiyanti. (2015). *Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. AKRUAL. Vol. 7, No. 2.
- Sukirno, Sadono (2013). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.